

TANAH, PERTANIAN DAN DORONGAN MIGRASI

Kasus pada Dua Komunitas Pertanian
di Dataran Tinggi di Kabupaten Gunung Kidul,
Daerah Istimewa Yogyakarta

Tri Pranadji*)

Abstrak

Walaupun "revolusi" di bidang pertanian ("revolusi hijau") telah memperlihatkan hasilnya, dan revolusi pertanahan (UU Pokok Agraria 1960) telah dibuat, tampaknya gejala adanya dorongan penduduk desa untuk bermigrasi ke luar desanya masih kuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam dan holistik kaitan antara tanah, pertanian dan dorongan penduduk bermigrasi. Dengan mengambil kasus pada komunitas pertanian di dataran tinggi (desa Kedungpoh dan Katongan), kecamatan Nglipar, kabupaten Gunung Kidul diperoleh beberapa gambaran, **Pertama**, sumberdaya tanah masih menjadi faktor strategis yang menentukan dinamika perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Kuatnya dorongan penduduk untuk bermigrasi ke luar desanya antara lain disebabkan oleh semakin sempitnya rata-rata penguasaan tanah pertanian. **Kedua**, perkembangan teknologi pertanian yang ada belum cukup memberi peluang petani memperoleh pendapatan yang wajar untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dorongan melakukan migrasi ke luar, dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya, yang dialami petani perlu dipandang sebagai gejala positif. **Ketiga**, keinginan golongan muda pedesaan bermigrasi ke kota tampaknya sejalan dengan keinginan orang tua yang umumnya jarang yang menghendaki anaknya tetap bekerja di pertanian. Status pekerjaan di kota, terutama pegawai (pemerintah maupun swasta), dinilai mencerminkan status sosial yang terhormat. **Keempat**, sejauh informasi tentang daerah tujuan dianggap meyakinkan, migrasi ke desa daerah lain (misalnya: Lampung) diminati oleh penduduk (terutama) golongan di atas usia muda. **Kelima**, tampaknya masalah penataan pertanahan di pedesaan tetap penting untuk diperhatikan, dan diperkirakan akan tetap menjadi penentu yang sulit diabaikan bagi dinamika perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

PENDAHULUAN

Migrasi adalah suatu bagian penting dari masalah penduduk, dan diperkirakan telah berlangsung sejak peradaban manusia muncul. Beberapa penelitian arkeologi dan antropologi sedikit banyak telah membuktikan hal itu. Salah seorang antropolog, yaitu Sjahrir (1989), menyebutkan bahwa proses perpindahan manusia dari satu wilayah ke wilayah lain telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satu penyebab migrasi adalah kesulitan ekonomi.

Mengutip pendapat Syahrir (1989) perkembangan migrasi desa-kota di Jawa sejak tahun 1970-an telah berlangsung dengan cepat dan dengan frekuensi tinggi, sehingga penduduk kota antara 1970 – 1975 tumbuh sekitar 4,70 persen per tahun.

Dengan anggapan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata sekitar 2 persen per tahun, dapat ditaksir bahwa 50 persen dari pertambahan penduduknya disebabkan oleh migrasi. Sementara itu, walaupun belum diperoleh angka akurat, migrasi juga berlangsung antara desa-desa, yang diduga bahwa migrasi tersebut berkaitan juga dengan terbatasnya lahan pertanian di daerah asal. Pendeknya ke dua jenis migrasi ini diwarnai oleh masalah pertanahan, yang hingga saat ini diperkirakan masih menjadi sumberdaya strategis perekonomian petani di pedesaan.

*) Staf Peneliti, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

Menurut hasil Sensus Penduduk 1990 (Harian Kompas, 3 Januari 1991) Indonesia telah berhasil melakukan revolusi kependudukan terutama dilihat dari segi penurunan pertumbuhan penduduknya menjadi sebesar 1,98 persen per tahun (1980 – 1990). Sebelumnya, pada 1985, Indonesia telah menancapkan tonggak keberhasilan melakukan "revolusi pertanian" dengan tercapainya swasembada beras. Sejak 1960, dengan ditetapkannya UU Pokok Agraria 1960, Indonesia sebenarnya telah berniat melakukan "revolusi pertanahan" sebagai dasar yang tangguh sebelum melakukan modernisasi pertanian dan melangkah ke masyarakat industri. Hanya saja pelaksanaan dari UU ini belum lancar, sehingga masalah pertanahan hingga sekarang ini masih menjadi topik bahasan yang tidak pernah basi, termasuk dalam kaitannya dengan permasalahan migrasi.

Tulisan ini membahas adanya gejala dorongan migrasi yang dikaitkan dengan penguasaan tanah dan perkembangan pertanian. Semakin sempitnya penguasaan tanah pertanian oleh petani, yang diperkirakan sebagai kelanjutan proses marginalisasi yang telah terjadi sejak jaman Belanda (Bremen, 1986), diperkirakan menjadi sebab penting mengapa perkembangan pertanian yang telah ada tetap sulit untuk mengimbangi tuntutan kebutuhan hidup petani pada taraf yang wajar. Pada gilirannya hal ini diperkirakan dapat menjadi salah satu pendorong terjadinya migrasi ke luar desa.

Kasus yang diangkat dalam tulisan ini adalah dua komunitas (desa) pertanian di dataran tinggi di kabupaten Gunung Kidul, yaitu desa Kedungpoh dan Katongan, kecamatan Nglipar. Alasan pemilihan dua komunitas adalah bahwa pada dua komunitas pertanian di dataran tinggi ini mempunyai potensi adanya dorongan migrasi ke luar. Disamping itu, alasan bahwa dengan dapatnya penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan, memungkinkan penulis untuk bisa menjelaskan gejala ini tidak saja dari segi ideografisnya namun juga dari segi nomotetisnya.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk melihat secara lebih mendalam hal-hal yang berkaitan dengan :

- (1) Sampai sejauh mana sumberdaya tanah pertanian yang tersedia di pedesaan ikut menentukan

dinamika penduduk, khususnya di bidang migrasi ke luar.

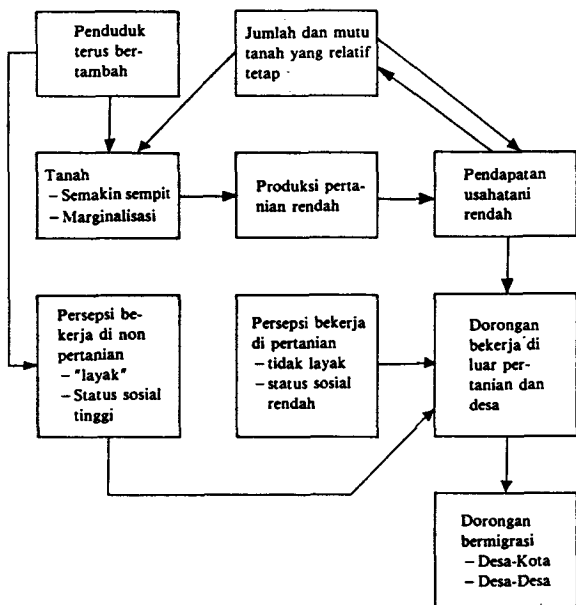
- (2) Apakah tingkat kemajuan (adopsi) dan rekayasa teknologi pertanian pada komunitas di dataran tinggi yang dicapai selama ini secara sosial ekonomi telah cukup mampu membendung animo masyarakat desa untuk bermigrasi.
- (3) Persepsi masyarakat desa terhadap lapangan pekerjaan bidang pertanian di pedesaan dan non pertanian di perkotaan yang berkaitan dengan dorongan bermigrasi ke luar.
- (4) Faktor-faktor lain apa saja yang ikut memperbesar dorongan pada golongan tertentu dari masyarakat desa untuk bermigrasi ke kota atau ke desa di lain daerah.

METODE PENELITIAN

Kerangka Pemikiran

Kerangka pendekatan yang digunakan untuk menganalisa masalah tanah, perkembangan pertanian, dan dorongan migrasi diusahakan sesederhana mungkin. Faktor-faktor yang walaupun diakui ikut berpengaruh terhadap dorongan migrasi, misalnya ekologi desa, sebagaimana dibahas Soemarwoto (1978), integrasi budaya (Steward, 1961), struktur perekonomian desa, serta struktur tenaga kerja dan upah, itu tidak terlalu dibahas mendalam. Kerangka melihatnya lebih ditekankan pada aspek-aspek yang mudah diamati dan pengaruhnya terhadap dorongan migrasi tampak jelas. Gambar 1 menjelaskan rangkaian faktor tanah pertanian, produksi pertanian, penerimaan atau pendapatan usahatani, persepsi petani, dan dorongan bekerja atau bermigrasi ke luar desa.

Dengan gambar tersebut ditunjukkan bahwa faktor tanah yang semakin menyempit, akibat tekanan dan pertambahan jumlah penduduk, untuk kegiatan pertanian menjadi sebab penting adanya dorongan bagi penduduk pedesaan (pertanian) untuk bermigrasi. Menurut Sajogyo (1977), tanah sempit ini merupakan salah satu faktor penting yang menyulitkan penduduk pedesaan untuk memperoleh pendapatan yang layak bagi kehidupannya. Selanjutnya hal ini berangsur-angsur membentuk persepsi masyarakat pedesaan untuk memberikan penilaian bahwa bekerja di pertanian bukan saja tidak layak untuk hidup, namun juga tidak mencerminkan martabat ("status sosial") yang wajar. Teknologi pertanian bisa saja berhasil diadopsi pe-



Gambar 1. Rangkaian faktor (penduduk, tanah, produksi dan pendapatan usahatani, persepsi petani, dan dorongan bekerja di luar pertanian dan desa) yang mendorong masyarakat desa bermigrasi.

tani untuk meningkatkan produktivitas per hektar tanaman pangan, namun hal ini belum cukup mengatasi tingkat pendapatan yang diperlukan petani.

Jumlah dan mutu tanah dapat dikatakan relatif tidak bertambah, yang sementara itu penduduk yang memerlukan tanah terus bertambah. Akibatnya ketersediaan tanah pertanian untuk mendukung kehidupan masyarakat pedesaan menjadi semakin terbatas. Paling tidak ada dua kemungkinan besar yang bisa terjadi, yaitu penduduk pedesaan terdorong untuk bermigrasi dan mencari lapangan pekerjaan di kota, atau mencari daerah pedesaan lain yang menyediakan sumberdaya tanah relatif luas dan murah. Faktor kepadudukan yang akan dapat membedakan mana yang lebih kuat diantara keduanya diduga adalah golongan umur. Faktor jenis kelamin bisa saja ikut menentukan, namun diperkirakan tidak sekuat golongan umur.

Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi. Lokasi kabupaten yang dipilih untuk penelitian lapangan adalah Kabupaten Gunung Kidul. Atas dasar pertimbangan khusus, antara lain : (1) teknologi pertanian (melalui Pro-

yek Bangun Desa, sejak 1979) telah cukup berkembang, (2) terdapat variasi penguasaan tanah pertanian oleh masyarakat petani setempat, dan (3) cukup terlihat adanya gejala migrasi ke luar maka dipilih dua desa penelitian, yaitu desa Kedungpoh dan Katongan. Keduanya terletak di Kecamatan Nglipar, dimana desa Kedungpoh adalah desa yang terkena Proyek Bangun Desa (sejak 1979), sedang desa Katongan tidak.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan sendiri oleh penulis di lapangan selama lebih kurang dua setengah bulan pada pertengahan 1983. Data sekunder yang dikumpulkan bersumber dari publikasi dan data pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa. Sedang data primer diperoleh melalui wawancara dengan petani, tokoh masyarakat, pejabat desa, dan pemuda desa dengan bantuan kuesioner setengah terstruktur dan catatan harian.

Analisa Data

Analisa data. Penganalisaan atas data dan informasi yang terkumpul dilakukan secara deskriptif dengan bantuan tabulasi (sederhana) silang dua arah dan gambar. Sejauh mungkin, dalam penganalisaan secara kualitatif, digunakan pendekatan verstehen, sehingga obyektivitas penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.

PENGUASAAN TANAH

Dengan penduduk yang terus bertambah sekitar 1,15 persen (Kedungpoh) dan 0,52 persen (Katongan) per tahun. Sementara mutu sumberdaya tanah relatif kurang, tekanan penduduk atas tanah akan terasa bertambah berat. Pengembangan teknologi tumpangsari, sebagaimana diungkapkan Simon (1975) pada kasus pertanian di pedesaan India, kemungkinan besar masih belum mampu mengatasi tekanan penduduk yang jumlahnya terus bertambah. Justru yang terjadi di Desa Kedungpoh adalah kebalikannya, dimana setelah ada program introduksi teknologi pertama baru, melalui Proyek Bangun Desa ada indikasi, pola tumpangsari semakin ditinggalkan dan bergeser ke arah pola monokultur.

Luas menurut status penggunaan tanah di kedua komunitas diperlihatkan pada Tabel 1. Tampak

bahwa, walaupun kedua komunitas berdekatan, distribusi luas tanah menurut penggunaannya tidaklah sama. Perbedaan yang tajam tampak pada tanah milik perorangan dan milik kehutanan (pemerintah). Luas tanah milik perseorangan secara keseluruhan di desa Kedungpoh dan Katongan masing-masing adalah 852,37 ha (78,95%) dan 622.54 ha (45,91%). Luas tanah milik kehutanan di desa Kedungpoh dan Katongan masing-masing adalah 205,39 ha (19,03%) dan 693,84 ha (51,16%). Bagian tanah milik desa, walaupun terdapat perbedaan dalam luas namun dapat dianggap tidak seberapa. Komposisi tanah milik perorangan berdasar jenisnya (pekarangan, sawah, dan tegalan atau tanah kering) tampak berbeda cukup besar, terutama pada tanah sawah di kedua komunitas.

Khusus tanah milik perorangan perlu mendapat sorotan lebih khusus, mengingat dari sinilah sumber perekonomian atau kehidupan masyarakat pedesaan terpenting. Selain itu, diingatkan oleh Tjondronegoro (1980), bahwa penguasaan aset tanah ini erat kaitannya dengan masalah kerukunan atau solidaritas masyarakat pedesaan. Dengan penguasaan tanah yang serba terbatas ("sempit") akan sukar bagi masyarakat desa mempunyai surplus pendapatan untuk menggalang kebersamaan melebihi batas hubungan personal. Keperluan seremonial, sebagaimana diketengahkan Wolf (1983), untuk mempertahankan kehidupan yang didasarkan asas kekeluargaan di pedesaan harus disertai dengan pembiayaan.

Pemilikan tanah perorangan diatur oleh keagrariaan dengan sertifikasi tanah. Di desa Kedungpoh sertifikasi tanah hampir semuanya beres hingga

model C, dan beberapa telah sampai model D. Di desa Katongan, karena tidak ada program khusus sertifikasi tanah, sertifikasi tanah masih tersendat. Di desa Katongan beberapa petani mengaku telah lebih dari sekali membayar administrasi pembuatan sertifikat tanah (model C), namun tetap belum memperoleh pelayanan yang memadai. Dalam kaitan ini tampaknya petani cenderung lebih tertib dari pada atasan desa. Karena menurut pandangan petani urusan tanah ini cukup penting, wibawa pamong desa sering kurang memperoleh tempat yang wajar di hati petani.

Pemilikan tanah seringkali dianggap sebagai faktor penting untuk melihat stratifikasi sosial. Tabel 2 menunjukkan distribusi luas pemilikan tanah di kedua komunitas. Berpatokan pada kriteria Sajogyo (1977) atas hasil Susenas (1976) maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar petani termasuk golongan petani miskin (pemilikan kurang dari 0,50 ha), terlebih-lebih lagi di desa Katongan. Jumlah petani yang memiliki luas tanah di bawah 0,25 ha masing-masing 23,80 persen (Kedungpoh) dan 46,70 persen (Katonan). Keadaan ini menggambarkan bahwa kehidupan kedua komunitas akan sukar jika mengandalkan dari tanah pertanian. Faktor ini agaknya turut menentukan persepsi masyarakat untuk tidak selamanya menggantung hidup di pertanian, terutama golongan mudanya.

Dari gambaran tersebut dapat ditarik beberapa implikasi, *pertama*, adalah masuk akal jika kemiskinan akan dekat atau (bahkan) melekat pada kegiatan pertanian rakyat. *Kedua*, situasi ini mendasari timbulnya kesan inferioritas pertanian di

Tabel 1. Distribusi luas tanah menurut status pemilikan dan penggunaannya di desa Kedungpoh dan Katongan, 1983.

Status dan penggunaan	Kedungpoh		Katonan	
	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Milik desa	21,72	2,02	39,71	2,93
Milik perorangan	852,37	78,95	622,54	45,91
– Pekarangan	291,93	27,04	194,07	14,31
– S a w a h	82,73	7,66	45,58	3,36
– Tegalan/tanah kering	477,71	44,25	382,89	28,23
Milik pemerintah	205,39	19,03	693,84	51,16
– Hutan negara	158,54	14,69	531,00	39,16
– Kuburan	1,30	0,12	1,42	0,10
– Jalan, kali, dan lain-lain	45,55	4,22	161,44	11,90
Jumlah	1.079,48	100,00	1.356,09	100,00

Sumber: Daftar Isian Penelitian Tata Desa, 1983.

Tabel 2. Jumlah kepala keluarga (KK) yang memiliki tanah menurut jenis dan luasnya di Desa Kedungpoh dan Katongan, 1982.

Luas tanah (ha)	Desa Kedungpoh				Desa Katongan			
	Pkr ¹⁾	Swh ²⁾	Tk ³⁾	Jumlah	Pkr ¹⁾	Swh ²⁾	Tk ³⁾	Jumlah
 (KK)							
0,25	160 (20,8)	151 (32,3)	273 (25,6)	584 (23,8)	250 (62,2)	td ⁴⁾ —	221 (46,5)	471 (46,7)
0,25 – 0,50	325 (42,3)	255 (54,5)	300 (28,1)	880 (38,2)	104 (25,9)	46 (34,9)	164 (34,6)	317 (31,2)
0,50 – 0,75	100 (13,0)	50 (10,7)	200 (18,7)	350 (15,2)	20 (5,0)	45 (34,1)	55 (11,6)	120 (31,2)
0,75 – 1,00	150 (19,5)	12 (2,5)	175 (16,4)	337 (14,6)	10 (2,5)	8 (6,8)	10 (1,3)	28 (2,5)
1,00 – 1,25	12 (1,6) – (5,6)	td* (3,1)	60 (2,5)	72 (6,8)	10 (1,3)	9 (2,5)	6	25
1,25 – 1,50	10 (1,3)	td* —	20 (2,6)	30 (1,7)	5 (1,2)	21 (15,9)	15 (3,2)	41 (4,1)
1,50 – 1,75	6 (0,8)	td* —	20 (1,9)	26 (1,1)	1 (0,2)	1 (0,8)	1 (0,2)	3 (0,3)
1,75 – 2,00	3 (0,7)	td* —	12 (1,1)	17 (0,7)	td* —	td* —	td* —	td* —
2,00	td* —	td* —	td* —	td* —	2 (0,5)	2 (1,5)	2 (0,4)	2 (0,6)

Sumber: Daftar Isian Penelitian Tata Desa 1982.

Keterangan: ¹⁾ Tanah Pekarangan
²⁾ Tanah Sawah
³⁾ Tanah Kering (tegalan)
⁴⁾ Tanpa data atau data tidak tertulis.
 Angka dalam kurung () adalah persentase.

mata generasi muda di pedesaan. *Ketiga*, hal ini seharusnya memberikan cukup alasan agar tenaga kerja muda di pedesaan terdorong ke luar dari sektor pertanian. Gejala ini tampaknya juga terangkap oleh data Supas 1985 (Suryana dan Nurmalina, 1988). Menurut Rahardjo (1984), adalah tidak logis jika pertanian tanaman pangan dibebani untuk menyediakan bahan baku atau bahan pangan murah dalam rangka "mensubsidi" secara tidak wajar perkembangan industri di perkotaan. Justru seyogyanya lebih dipikirkan bagaimana agar sektor industri di perkotaan mampu menyerap kelebihan tenaga kerja di pertanian.

PERKEMBANGAN PERTANIAN DAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA

Hampir mencapai 80 persen penduduk pedesaan di kedua komunitas bekerja di pertanian, dan yang termasuk buruh tani sekitar 15 persen. Umumnya kegiatan pertanian gabungan dari tanaman pangan

(padi gogo dan palawija), peternakan, dan tanaman karangkitri. Walaupun mata pencaharian lain seperti pengrajin ($\pm 7,5\%$), pedagang ($\pm 5\%$), dan tukang ($\pm 6\%$) telah cukup dikenal namun kurang menonjol dan masih kurang diminati penduduk setempat. Salah satu sebab mengapa pekerjaan di luar pertanian kurang diminati adalah tidak teratur dan kontinyunya permintaan pasar di pedesaan setempat dan sekitarnya.

Menurut Harrison (1988) perkembangan teknologi pertanian merupakan faktor penting yang menentukan tingkat perkembangan masyarakat. Karena pertanian pangan masih menjadi bagian strategis perekonomian di kedua komunitas, maka gejala perkembangan kedua komunitas tersebut dapat diukur dari perkembangan teknologi pertanian tanaman pangannya. Perkembangan teknologi tersebut dapat ditelusuri dari penggunaan input produksi selain tenaga kerja, seperti bibit, pupuk, dan obat-obatan. Walaupun demikian, pada akhirnya, penggunaan teknologi tersebut harus dikaitkan dengan sampai seberapa jauh tingkat produksi dan pendapatan yang dapat dicapai.

Tabel 3. Tingkat rata-rata pemakaian pupuk untuk jenis tanaman pangan utama per ha dalam setahun, 1983.

Jenis pupuk	Desa Kedungpoh	Desa Katongan
Urea (kg/ha)	334,8	251,4
TSP (kg/ha)	115,1	156,8
Kandang (pikul/ha)	163,0	171,7

Dari Tabel 3 dan 4 tampak bahwa penggunaan pupuk dan obat-obatan di kalangan petani telah dikenal luas. Hal ini sejalan dengan telah dikenalnya penggunaan bibit unggul, terutama padi dan jagung. Dibanding dengan daerah lain yang ekologiannya serupa, seperti Probolinggo (Pranadji dan kawan-kawan, 1990) dan pengamatan penulis di Majalengka (1990), penggunaan input produksi tersebut relatif tinggi. Dengan tersedianya informasi yang cukup dan ditunjang ketersediaan input produksi di pasaran lokal, adopsi teknologi pertanian yang dimaksud telah menjadi bagian adaptasi masyarakat terhadap tekanan dan pertumbuhan jumlah penduduk. Karena dalam hal ini telah terasa bahwa tanah menjadi sumberdaya kritis, sebagaimana Bronson (1975) menyebutkan bahwa kritisnya sumberdaya tanah dapat menjadi pemacu perkembangan pertanian, teknologi pertanian secara berangsur-angsur menjadi bagian dari masalah penduduk.

Tabel 4. Tingkat rata-rata obat-obatan yang dipakai petani untuk tanaman pangan per ha dalam setahun, 1983.

Jenis pupuk	Desa Kedungpoh	Desa Katongan
Furadan (kg/ha)	19,9	8,8
Diazinon (lt/ha)	8,5	4,2
Sevin (kg/ha)	9,0	4,9
Obat gabah (kg/ha)	2,5	0,9

Tabel 5 menunjukkan tingkat pencapaian rata-rata produksi per hektar tanaman pangan di kedua komunitas. Pencapaian tingkat produksi ini jauh lebih tinggi dibanding yang ditunjukkan Scheltema (1986) pada kurun 1922 – 1927 yang masing-masing untuk padi sebesar 17,21 kw (Sleman) dan 8,20 kw (Gunungkidul) per hektar. Dengan demikian dapat ditunjukkan bahwa dalam kurun waktu sekitar 50 tahun telah terjadi perkembangan teknologi pertanian yang cukup berarti. Artinya, walaupun tanpa dukungan penyuluhan yang intensif hingga di tingkat petani, petani menunjukkan sikap yang responsif terhadap teknologi pertanian yang terus berkembang maju.

Tabel 5. Produktivitas rata-rata per hektar (ha) beberapa jenis tanaman pangan utama, 1983.

Jenis tanaman pangan utama	Desa Kedungpoh	Desa Katongan
 (kw/ha)	
Padi gogo ¹⁾	22,43	21,60
Ubikayu ²⁾	29,25	13,04
Jagung ³⁾	3,24	2,73
Kedele ⁴⁾	3,60	3,36

Keterangan: 1) gabah kering panen
 2) ubikayu basah berkulit
 3) jagung pipilan (wose)
 4) biji kedele (wose)

Tingkat produktivitas tanaman pangan utama yang relatif lebih tinggi di desa Kedungpoh antara lain karena adanya peningkatan curahan jam kerja yang lebih tinggi, 3792,4 jam kerja (Kedungpoh) dan 2781,1 jam kerja (Katongan) per tahun. Dengan perhitungan bahwa faktor tenaga kerja sekitar 71,78 persen (Kedungpoh) dan 67,53 persen (Katongan) dari keseluruhan biaya produksi, maka keuntungan usahatani di luar sewa tanah dan bunga modal adalah sekitar Rp 225.000,- (Kedungpoh) dan Rp 210.000,- (Katongan) per ha per tahun. Dengan rata-rata pemilikan tanah di bawah 0,5 ha per KK, perbedaan tingkat keuntungan usahatani dari peningkatan produktivitas ("teknologi") tersebut diperkirakan tidak berimplikasi cukup nyata terhadap kesejahteraan petani.

Tingkat pendapatan dan keuntungan usahatani per ha tanaman pangan tersebut tampaknya masih jauh dari rata-rata tingkat pengeluaran rumah tangga petani (Tabel 6). Dari gambaran ini dapat ditarik penafsiran bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya petani harus mencari tambahan pendapatan dari luar usahatani, termasuk untuk keperluan makan dan minum. Walaupun petani umumnya memelihara ternak dan tanaman lain non pangan, namun diperkirakan dari hasil keuntungannya masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Sebagai gambaran, menurut catatan dari beberapa petani yang mempunyai anak sekolah di SMA bahwa untuk mencukupi keperluan biaya sekolah selama setahun adalah senilai seekor sapi dewasa atau sekitar Rp 450.000,- (nilai tahun 1983).

Komposisi pengeluaran rumah tangga (Tabel 6) menggambarkan bahwa porsi terbesar (>65%) adalah untuk konsumsi (makan, minum, dan rokok). Pengeluaran untuk pendidikan menempati rangking kedua, menunjukkan bahwa perhatian

Tabel 6. Jumlah rata-rata pengeluaran rumah tangga dan alokasinya menurut jenis pengeluarannya, 1983.

Jenis pengeluaran	Desa Kedungpoh		Desa Katongan	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Makan dan minum (termasuk rokok)	594.492	69,35	444.345	65,05
Pakaian	54.130	6,31	56.896	8,44
Perkakas rumah	11.310	1,32	9.800	1,45
Pendidikan	130.580	15,23	95.800	14,22
Kesehatan	10.340	1,21	11.060	1,64
Rekreasi	10.600	1,24	8.700	1,29
Pajak	1.923	0,22	1.196	0,18
Lain-lain (sumbangan, iuran, dan lain-lain)	43.900	5,12	-46.000	6,83
Jumlah	857.900	100,00	673.797	100,00

petani terhadap pendidikan telah cukup baik. Jika pendapatan dapat ditingkatkan, menurut pengakuan beberapa petani, akan diprioritaskan untuk tambahan biaya pendidikan anaknya.

Dari data (Tabel 6) menunjukkan adanya indikasi bahwa peningkatan pendapatan petani masih juga akan diikuti dengan peningkatan persentasenya untuk pemenuhan konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan adanya gejala bahwa dari alokasi pendapatan yang ada, berdasar atas persepsi petani, pemenuhan konsumsi rumah tangganya masih belum mencukupi.

PENDUDUK DAN DORONGAN MIGRASI

Jumlah penduduk dan kepadatannya masing-masing adalah 5.677 jiwa (Kedungpoh) dan 5.602 jiwa (Katongan), dan kepadatannya masing-masing 526,13 jiwa dan 413,13 jiwa per km². (Sebagai gambaran rata-rata kepadatan penduduk di Jawa sekitar 650 jiwa per km²). Pada tingkat kepadatan ini rata-rata setiap jiwa menempati bagian tanah seluas masing-masing 0,19 ha (Kedungpoh) dan 0,24 ha (Katongan). Dengan rata-rata ukuran keluarga sebesar 4,28 jiwa (Kedungpoh) dan 4,66 jiwa (Katongan) per KK, maka rata-rata setiap KK bisa mengerjakan tanah seluas 0,79 ha dan 0,62 ha per KK.

Dari uraian di muka telah ditunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk di kedua komunitas relatif rendah, terutama jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk nasional 1970-1980, sekitar 2,34% per tahun. Faktor

pertumbuhan penduduk di kedua komunitas agaknya tidak menjadi kendala serius bagi pengembangan masyarakatnya. Dengan diterimanya program KB secara cukup baik oleh masyarakat setempat, tingkat kelahiran mempunyai harapan untuk ditekan. Tingkat kematian kasar relatif rendah, yaitu di bawah 15 jiwa per 1000 penduduk. Distribusi penduduk menurut jenis kelamin relatif normal, yaitu dengan *sex ratio* 98,90 persen (Kedungpoh) dan 94,60 persen (Katongan).

Sempitnya penguasaan tanah pertanian lambat laun mempengaruhi persepsi masyarakat untuk menganggap bahwa kegiatan pertanian bukan saja tidak mencukupi keperluan hidup layak, namun juga mencerminkan status sosial rendah. Persepsi ini tidak hanya berlaku pada golongan mudanya namun juga pada petani yang termasuk tua. Tabel 7 dan 8 mencerminkan adanya kemiripan persepsi yang dimaksud, terutama dikaitkan dengan lapangan pekerjaan.

Tabel 7. Jenis pekerjaan menurut persentase responden (pemuda) yang menginginkan, 1983.

Jenis pekerjaan	Desa Kedungpoh Desa Katongan	
 (%)	
Pegawai kantoran (negeri/swasta)	90,00	70,00
Pengusaha	20,00	30,00
A B R I	20,00	10,00
Petani	10,00	10,00
Peternak	20,00	10,00
Industri rumah tangga	0	30,00

Di kedua komunitas sekitar 80 persen golongan mudanya menginginkan bekerja di kota. Pengetahuan yang lebih terbuka dengan dunia luar, yang diterima lewat bangku sekolah, lebih mengarahkan pemuda desa kepada pandangan yang lebih masuk akal. Corak kehidupan masyarakat kota yang didengar lewat kenalan atau saudara, dibaca lewat surat kabar dan majalah, dan dilihat langsung dan lewat televisi menimbulkan dorongan atau motivasi pemuda pedesaan untuk pindah atau bekerja di kota. Pekerjaan di pertanian tidak saja dinilai kurang menjamin kehidupan layak, namun secara psikologis dianggap tidak menarik. Sebagai contoh, kegiatan mencangkul di sawah atau tegalan, jika tidak terpaksa karena ancaman kelaparan, sangat dihindari. Menganggur atau bersantai lebih disukai dari pada bekerja di pertanian. Di daerah lain, kasus serupa juga dijumpai penulis pada beberapa desa di Lampung Tengah, Asahan, dan Tapanuli Utara.

Tabel 8. Jenis pekerjaan yang dikehendaki petani (orang tua) terhadap anaknya menurut persentase responden yang menyebutnya.

Jenis pekerjaan	Desa Kedungpoh Desa Katongan	
 (%)	
Pegawai kantor (negeri/swasta)	50,00	70,00
A B R I	20,00	20,00
G u r u	20,00	10,00
Petani	10,00	0

Menurut persepsi petani, bekerja di pertanian, itu rekasa ("berat dan susah"). Bekerja sebagai pegawai negeri (termasuk ABRI) dan swasta di perkotaan dianggap lebih enak dan mencerminkan status sosial yang lebih tinggi. Gambaran demikian seringkali masih kurang dipahami oleh kalangan luar desa. Tampaknya masih ada penilaian yang tidak tepat bahwa adanya keengganan penduduk desa bekerja di pertanian menandakan tidak rasionalnya petani. Dalam harian Kompas (3 Januari 1991), Singarimbun menyebutkan, bahwa semakin besar proporsi penduduk di perkotaan menandakan adanya kemajuan. Sebab menurut penilaiannya kemiskinan di pedesaan jelas lebih parah dibanding perkotaan.

Berdasar pandangan bahwa menjadi pegawai kantor atau "priyayi" lebih mencerminkan status kehidupan lebih baik, hal ini cukup menjadi pendorong pemuda desa dan petani terhadap anaknya

untuk memilih bekerja di kota. Dari persepsi ini telah diperoleh gambaran adanya dorongan penduduk desa untuk melakukan migrasi ke kota. Langkah-langkah rintisan ke arah itu, misalnya ditunjukkan oleh adanya :

- (1) Golongan wanita muda mengadu nasib bekerja di kota sebagai bakul, pembantu rumah tangga, dan buruh-buruh pabrik. Tidak jarang, walaupun masih sulit dibuktikan, beberapa dari mereka terjerumus dalam pekerjaan prostitusi daerah perkotaan dan obyek-obyek wisata.
- (2) Golongan laki-laki yang kurang berpendidikan diantaranya bekerja sebagai tukang kayu dan bangunan (*glidig*), dagang kecil-kecilan, dan berjualan makanan dan minuman (misalnya : bakso dan es cendol).
- (3) Golongan laki-laki yang telah tamat pendidikan SMP berupaya menghubungi kenalan dekat orang tuanya, saudara, atau saudara tetangga dekat untuk mencari pekerjaan di kantor pemerintah maupun swasta.

Dari hasil observasi penulis di Lampung pada 1987 ditemukan beberapa petani yang berasal dari Gunungkidul, Wonogiri, Trenggalek, dan daerah dataran tinggi bagian selatan Jawa lainnya. Mereka melakukan migrasi menetap, sebagai petani yang mengusahakan tanah kering, disebabkan diperoleh jaminan-jaminan hidup relatif lebih baik di Lampung. Umumnya petani tersebut pada awalnya tidak mempunyai tanah cukup, dan bahkan beberapa petani tidak mempunyai tanah sama sekali di daerah asal. Dengan bekal dan modal seadanya mereka berusaha dan akhirnya umumnya bisa memperoleh tanah garapan sekitar 1 ha dalam kurun waktu 5 – 6 tahun. Dalam hal ini berlaku, selain migrasi desa - kota, juga migrasi desa - desa. Faktor yang lebih menentukan mereka melakukan migrasi adalah adanya harapan untuk bisa hidup lebih baik dan memperoleh lapangan kerja.

Migrasi permanen desa - desa, di luar program transmigrasi pemerintah, dapat dilukiskan seperti pada Gambar 2. Arus migrasi ini terwujud setelah adanya informasi dan pembuktian langsung di lapangan. Informasi ini lebih dipercaya jika disampaikan oleh kenalan dekat, atau saudara yang sama-sama bekerja di pertanian. Faktor luasnya tanah yang mungkin bisa dikuasai dan tingkat produksi yang bisa dicapai untuk menunjang keperluan hidup merupakan daya tarik petani Gunungkidul untuk melakukan migrasi menetap desa - desa.

Perlu diinformasikan bahwa pada 1942 dan 1955 ada beberapa petani dari dua komunitas ber-

transmigrasi spontan, antara lain ke Lampung. Alasan yang berhasil ditangkap, bahwa mereka terdesak untuk mencari kemungkinan cukup makan dan hidup yang lebih layak. Sebenarnya sejak 1930-an, dorongan bertransmigrasi ini sudah ada. Hanya saja, karena informasi daerah tujuannya belum memadai, hal ini baru terlaksana sepuluh tahun kemudian. Keberhasilan para transmigran spontan tersebut menjadi katalisator dan menambah keyakinan para petani generasi berikutnya untuk mengikuti jejak pendahulunya. Lebih-lebih para petani yang telah berhasil tersebut pada waktu tertentu, misalnya pada hari raya Idul Fitri, sering berkunjung ke saudara-saudaranya dan menceritakan keberhasilannya di daerah baru.



Gambar 2. Daya dorong dan daya tarik petani melakukan migrasi menetap desa - desa disebabkan faktor tanah pertanian.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

- (1) Tanah merupakan faktor strategis yang ikut menentukan dinamika masalah penduduk, migrasi. Sumberdaya tanah merupakan juga

faktor yang sangat menentukan kualitas kehidupan petani di dataran. Dengan penguasaan tanah yang relatif sempit, hal ini memaksa petani, jika dimungkinkan, untuk bermigrasi ke luar pedesaan.

- (2) Adopsi teknologi pertanian telah terbukti berhasil meningkatkan produktivitas pertanian per satuan luas lahan, namun tampaknya hal ini belum cukup untuk mengimbangi tingkat kebutuhan rumah tangga petani. Dengan luas penguasaan tanah rata-rata di bawah 0,5 ha per KK, tingkat teknologi pertanian tanaman pangan yang ada hingga saat ini pun masih sukar diharapkan bisa mendukung tingkat kehidupan petani secara wajar. Oleh karena itu, adanya dorongan atau keinginan petani untuk bermigrasi atau keluar dari pertanian dan pedesaan perlu dipandang sebagai gejala positif bagi kesejahteraan petani.
- (3) Dorongan migrasi ke luar dari pertanian dan pedesaan lebih terasa pada golongan muda di pedesaan. Keengganan mereka untuk mau bekerja di pertanian, bukan saja disebabkan pertanian tidak mampu memberikan tingkat pendapatan yang wajar, namun juga memberi kesan berstatus sosial kurang terhormat. Bersamaan dengan itu, persepsi bahwa corak kehidupan dan lapangan kerja di perkotaan, mencerminkan status sosial tinggi dan memberikan harapan kehidupan yang lebih baik, pada gilirannya hal itu menarik minat pemuda pedesaan untuk melakukan migrasi ke kota. Hal ini tampaknya bersesuaian juga dengan keinginan petani, sebagai orang tua, terhadap lapangan kerja yang dianggap baik oleh anaknya.
- (4) Dorongan bermigrasi pada golongan petani yang telah cukup umur ternyata tidak hanya terarah ke perkotaan, namun juga ke pedesaan pertanian lain. Masalah kuncinya adalah apakah tempat tujuan migrasi untuk menetap memberikan peluang kehidupan yang lebih baik. Migrasi ke pedesaan pertanian lain tetap bisa menjadi pilihan, mengingat petani merasa tidak perlu terlalu banyak harus mengadakan penyesuaian diri dengan jenis pekerjaan di daerah tujuan. Dorongan ini akan menjadi kenyataan jika ketersediaan tanah di daerah tujuan memungkinkan, dan informasi lain tentang daerah tujuan dianggap meyakinkan. Informasi akan lebih diyakini kebenarannya jika bersumber dari kawan atau saudara dekat yang sama-sama sebagai petani daripada, misalnya,

jika hanya bersumber dari pejabat desa atau atasan desa.

- (5) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan dinamika kehidupan masyarakat pedesaan di dataran tinggi seyogyanya tidak mengabaikan masalah dorongan migrasi dan pertanahan. Untuk itu, UUPA 1960 seyogyanya memperoleh perhatian yang lebih wajar untuk diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Breman, J. 1986. Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja di Jawa: Jawa di Masa Kolonial. LP3ES, Jakarta.
- Bronson, B. 1975. The Earliest Farming : Demography as Cause and Consequence. in Population, Ecology, and Social Evolution (Ed. S. Polgar). The Hague : Mouton Publishers.
- Harrison, D. 1988. The Sociology Modernization and Development. Unwin Hyman. London.
- Harian KOMPAS, 3 Januari 1991. Penerbit PT. Gramedia, Jakarta.
- Pranadji, T., B. Winarso dan A.H. Taryoto. 1990. Pengembangan Kelompok Tani Pemakai Air di Desa Palang Besi, Probolinggo, Jawa Timur. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Rahardjo, D. 1984. Transformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja. UI Press. Jakarta.
- Sajogyo. 1977. Golongan Miskin dan Partisipasinya dalam Pembangunan Desa. PRISMA, VI(3) : 10-17. LP3ES. Jakarta.
- Scheltema, A.M.P.A. 1986. Produksi Beras di Jawa dan Madura. dalam Budaya Padi Sawah di Jawa (ed. Sajogyo dan W.L. Collier). Yayasan Obor dan Penerbit Gramedia. Jakarta.
- Simon, J. 1975. The Economics of Population Growth. Princeton University Press. Princeton.
- Soemarwoto, O. 1978. Ekologi Desa : Lingkungan Hidup dan Kualitas Hidup. PRISMA, XIV(11): 12-21. LP3ES. Jakarta.
- Steward, J.H. 1961. Theory of Cultural Change : The Methodology of Multilinear Evolution. University of Illinois Press. Urbana.
- Suryana, A. dan R. Nurmalina. 1988. Pemuda Pedesaan di Sektor Pertanian. Forum Statistik, VII(4): 10-13. Statistika Indonesia dan Biro Pusat Statistik. Jakarta.
- Syahrir, K. 1989. Migrasi Tukang Bangunan : Beberapa Faktor Pendorong. PRISMA, XVIII(5): 47-75. LP3ES. Jakarta.
- Tjondronegoro, S.M.P. 1980. Sosialisme, Komunalisme atau Populisme ? PRISMA (11), November 1980. LP3ES. Jakarta
- Wolf, E. 1983. Petani : Suatu Tinjauan Antropologis. (Penerjemah : YISS). Penerbit C.V. Rajawali. Jakarta.